



Konsep Integrasi Pendidikan Islam dalam Pendidikan Nasional: Upaya Menghindari Dikotomi Ilmu

Rusnawati^{1*}, Haris Riadi², Siti Jamiatussoleha³, Suseno⁴, Eti Susanti⁵

Magister Pendidikan Agama Islam, STAIN Bengkalis, Riau, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: watirusna066@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 17, 2024

Revised November 15, 2024

Accepted Desember 26, 2024

Available online January 10, 2025

Kata Kunci:

Pendidikan Islam; Pendidikan Nasional;
Dikotomi Ilmu

Keywords:

Islamic Education; National Education;
Dichotomy of Science



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Pendidikan nasional maupun pendidikan islam tentu saja mempunyai tujuan yang baik agar dapat menghasilkan generasi yang unggul. Masalah-masalah yang terjadi, salah satunya adalah pembagian atau pemisahan antara pendidikan nasional dan islam yang saling bertentangan seharusnya bias untuk dihindari. Jika keduanya memiliki tujuan yang baik, maka seharusnya permasalahan ini tidak ada. Integritas merupakan suatu hal yang penting. Untuk mengatasi masalah dikotomi di Indonesia, maka diperlukannya integritas pendidikan islam dalam pendidikan nasional sebagai upaya untuk menghindari dikotomi pendidikan tersebut yang akan dibahas di dalam makalah ini. Tujuan penulisan ini adalah bagaimana pendidikan islam dalam pendidikan nasional sebagai upaya menghindari dikotomi ilmu. Simpulan dari penulisan ini adalah dikotomi harus segera diakhiri salah satunya dengan menerapkan diintegrasikan pendidikan islam.

ABSTRACT

National education and Islamic education of course have a good goal in order to produce a superior generation. The problems that occur, one of which is the division or separation between national education and Islam which are contradictory to each other, should be biased to be avoided. If both have good goals, then this problem should not exist. Integrity is an important thing. To overcome the problem of dichotomy in Indonesia, the

integrity of Islamic education in national education is needed as an effort to avoid the dichotomy of education which will be discussed in this paper. The purpose of this writing is how Islamic education in national education is an effort to avoid the dichotomy of knowledge. The conclusion of this writing is that the dichotomy must be ended immediately, one of which is by implementing the integration of Islamic education.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting demi berlangsungnya perkembangan serta kehidupan bangsa yang maju. Pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa sekaligus menjadi cerminan kepribadian dari masyarakatnya. Sebab pendidikan yang maju akan menghasilkan msyarakat yang maju pula serta modern sesuaai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Adapun keterkaitan antara pendidikan islam dan pendidikan nasional memiliki kaitan yang sangat erat. Sebab dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasioanal yang berupaya mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani dan iman yang berdasarkan kepada kepercayaan dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah membentuk individu Muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan moralitas. Pendidikan Islam adalah proses untuk membentuk manusia yang beriman kepada Allah, memiliki akhlak yang mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pendidikan juga merupakan sebuah proses untuk membangun peradaban bagi manusia. Dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1954 berisikan mengenai tujuan pendidikan dan pengajaran yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Bashori, 2017). Di Indonesia sendiri, diterangkan dalam undang-undang bahwapendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang dapat mensejahterakan masyarakat juga negaranya atau tanah airnya.

Salah satu fungsi dari pendidikan yaitu meningkatkan kemampuan dan membangun watak yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menghapuskan akar dari kebodohan dan penderitaan rakyat dari ketertinggalan zaman (Sujana, 2019). Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari fungsi pendidikan tersebut, Indonesia ingin pendidikan dapat menghilangkan penderitaan rakyat dari ketertinggalan dan ingin membentuk bangsa yang maju juga berkemampuan tinggi untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pendidikan terutama di Indonesia, masyarakat tentu saja memiliki tanggungjawab yang besar dalam pelaksanaan dibidang pendidikannya. Adanya kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan bakat generasi baru utukmemajukan peradaban manusia kearah yang lebih maju, hal tersebut dinyatakan dalam undang-undang N0.20 tahun 2003 pada pasal 4 ayat 6 (Sujana, 2019). Seluruh ajaran islam merupakan landasan dari pendidikan islam. Alquran dan hadis merupakan sumber untuk landasan tersebut. Kemudian, sumber-sumber tersebut akan dikembangkan oleh para ulama-ulama (Lubis & Asry, 2020). Dari keterangan tersebut, Alquran dan hadis merupakan sumber utama untuk ajaran islam atau pendidikan islam. Sumber utama tersebut dikembangkan kembali oleh para ulama-ulama berdasarkan pemahamannya. Tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membangun akhlak maupun karakter dari pesera didik. Pilar utama dari aqidah dan juga ibadah umat manusia adalah akhlak dan karakter. Kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh akhlak dan karakternya (Lubis & Asry, 2020).

Pada akhir abad ke- 20 lahirlah sebuah teori atau konsep keilmuan pendidikan islam. Islam membutuhkan ilmu dan pendidikan yang lebih unggul dibanding pendidikan lainnya. Pendidikan tersebut dilandaskan oleh hasil dari penelitian. Selain itu, pendidikan islam juga membutuhkan praktik dalam keilmuannya (Lubis & Asry, 2020). Pada awal abad ke-20 terjadi dikotomis dalam pendidikan islam yaitu dengan terjadinya perbedaan antarapendidikan islam atau agama dengan pendidikan formal atau umum. Dikotomi menurut KBBI merupakan pemisahan antara dua kelompok yang berbeda. Dikotomi merupakan salah satu masalah dalam dunia pendidikan terutama dalam pendidikan islam karena di Indonesia terjadi pemisahan antara

sekolah umum dan sekolah islam baik yang negeri maupun swasta. Dalam tanggung jawabnya pun berbeda antar kedua sekolah tersebut yaitu pendidikan umum merupakan tanggung jawab dari ruang lingkup Kemendikbud sedangkan pendidikan islam merupakan tanggung jawab dari lingkup Kemenag (Kementerian Agama) (Iskandar et al., 2022).

Integritas merupakan kemampuan untuk memunculkan kemampuan dalam wibawa dan kejujuran lalu membentuk sebuah kesatuan yang sifatnya utuh (KBBI). Integritas juga berkaitan dengan konsistensi untuk melahirkan para generasi yang unggul, jujur, berkarakter baik dan juga berprestasi. Dalam pembinaannya pendidikan islam dibina oleh kementerian agama, sedangkan pendidikan umum oleh kemendikbud. Selain itu, dinyatakan dalam pendidikan nasionalpun terdapat pendidikan islam didalamnya (Dainuri, 2018).

Pendidikan nasional maupun pendidikan islam tentu saja mempunyai tujuan yang baik agar dapat menghasilkan generasi yang unggul. Masalah-masalah yang terjadi, salah satunya adalah pembagian atau pemisahan antara pendidikan nasional dan islam yang saling bertentangan seharusnya bias untuk dihindari. Jika keduanya memiliki tujuan yang baik, maka seharusnya permasalahan ini tidak ada. Integritas merupakan suatu hal yang penting. Untuk mengatasi masalah dikotomi di Indonesia, maka diperlukannya integritas pendidikan islam dalam pendidikan nasional sebagai upaya untuk menghindari dikotomi pendidikan tersebut yang akan dibahas di dalam makalah ini. Tujuan penulisan ini adalah bagaimana pendidikan islam dalam pendidikan nasional sebagai upaya menghindari dikotomi ilmu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yakni, metode-metode yang digunakan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah kemanusiaan atau sosial (Moelong, 2018).

Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumen. Penelitian ini memanfaatkan teknik analisis data yang mengikuti tahapan yang direkomendasikan oleh Bungin (2001). Yaitu, dimulai pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), dan verifikasi dan penegasan kesimpulan (Bungin, 2001).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Integrasi Pendidikan

Sejak diberlakukan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Islam mendapatkan pengakuan sama dengan pendidikan umum. Lulusan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dianggap sama dengan lulusan SD, SMP dan SMA. Maka, setiap disebut SD disebut pula MI, menyebut SMP maka disebut MTs dan demikian pula tatkala menyebut SMA juga disebut MA. Justru pada tingkat perguruan tinggi, semisal STAIN dan IAIN, belum sepenuhnya mendapatkan posisi seluas itu.

Pendidikan Islam seharusnya berbeda dengan sekolah lain pada umumnya. Perbedaan itu menyangkut banyak hal, mulai dari orientasi atau tujuan, kurikulum, tenaga pengajar, maupun kultur yang seharusnya dikembangkan. Tatkala pendidikan

Islam disamakan dengan sekolah umum, bukan berarti persamaan itu dalam segala halnya. Persamaan itu adalah terkait dengan pengakuan oleh pemerintah, yaitu bahwa siapapun yang belajar dilembaga pendidikan Islam dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

Hal yang kadang disalah pahami, adalah bahwa sekolah Islam dianggap lebih rendah, hingga perlu disamakan kualitasnya. Padahal maknanya tidak seperti itu. Sebab tidak sedikit sekolah Islam yang sebenarnya lebih unggul kualitasnya dari sekolah umum lainnya.

Persamaan yang dituntut dan akhirnya diakomodasi oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu terkait dengan pengakuan oleh pemerintah. Namun seringkali, tokoh dan bahkan pejabat Kementerian Agama sekalipun, membuat statemen yang kurang produktif, dengan mengatakan bahwa madrasah atau pendidikan Islam selama ini tertinggal dari sekolah umum. Padahal walaupun statemen itu nyata, sebenarnya perbedaan itu tidak selalu signifikan, dan bahkan masih terdapat madrasah, yang berprestasi di atas sekolah umum. Bertolak dari rumusan UU Sistem Pendidikan Nasional RI No. 20 tahun 2003 (pasal 339), yang mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia mengarahkan warganya kepada kehidupan yang beragama. Maka sebagai salah satu bentuk realisasi dari UU Sisdiknas tersebut, Integrasi adalah alternatif yang harus di pilih untuk menjadikan pendidikan lebih bersifat menyeluruh (integral-holistik).

Gagasan integrasi (nilai-nilai islami [agama] dan umum) ini bukanlah sebuah wacana untuk meraih simpatik akademik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang harus dijalankan sebagai pedoman pendidikan yang ada, mengingat pendidikan selama ini dipengaruhi oleh dualisme yang kental antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum atau sekuler yang menyebabkan dikotomi ilmu.

Bukti nyata dari kebutuhan adanya panduan dan model integrasi ilmu ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya berbagai seminar nasional berkenaan dengan reintegrasi ilmu, sampai pada kebijakan dari pemerintah, seperti kebijakan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional dalam UUSPN No. 2 tahun 1989, madrasah mengalami perubahan "sekolah agama" menjadi "sekolah umum bercirikan khas Islam". Peng-integrasian madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional menemukan titik puncaknya pada awal 2000, setelah Presiden RI ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid yang mengubah struktur Kementrian Pendidikan dari "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi "Departemen Pendidikan Nasional".

Sejarah menunjukan, sudah sejak lama sebelum istilah Integrasi memposisikandiri dalam memberikan Berdasarkan Hal itu Abdurrahman Wahid menggulirkan ide "pendidikan satu atap" sistem pendidikan nasional dan memiliki status serta hak yang sama. Inilah yang diharapkan dan mengakhiri dikotomi "pendidikan umum" dan "pendidikan Islam". kerangka normatif nilai-nilai Islami pada pembelajaran, sebelumnya bahkan sampai saat ini gagasan Islamisasi Sains menjadi Jargon yang mendapat sambutan luar biasa dari cendekiawan Muslim, mulai Al-Maududi 1930-an, S.H. Nasr, Naquib Al-Attas dan Ja'far Syaikh Idris tahun 1960-1970-an; Ismail Al-Faruqi tahun 1980-an (Al-Faruqi, 1982); sampai pada Ziauddin Sardar. Islamisasi sains tersebut tidak lain adalah sebuah reintegrasi ilmu, dalam menangkal ilmu (sekuler) yang disertai isme-isme yang datang dari luar yang belum

tentu sesuai dengan peredaran darah dan tarikan nafas yang kita anut, yang akhir-akhir ini dikenal istilah integrasi.

Tujuan pendidikan nilai pada dasarnya membantu mengembangkan kemahiran berinteraksi pada tahapan yang lebih tinggi serta meningkatkan kebersamaan dan kekompakan interaksi atau apa yang disebut Piaget sebagai ekonomi interaksi atau menurut Oser dinyatakan dengan peristilahan kekompakan komunikasi. Tujuan pendidikan nilai tidak dapat tercapai tanpa aturan-aturan, indoktrinasi atau pertimbangan prinsip-prinsip belajar. Namun sebaliknya, dorongan moral komponen pembentukan struktur itu sangat penting. Oleh karena itu, pendidik seharusnya tidak hanya sekedar membekali dan menjejali siswa dengan pengetahuan tentang tujuan serta analisis dari hubungan antara tujuan dengan alat.

Pentingnya integrasi pendidikan nilai tersebut menjadi satu kerangka normatif dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam sebagaimana diungkapkan Ali Asraf bahwa tujuan pendidikan Islam: Pertama, mengambangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam dan mengembangkan pemahaman rasional mengenai Islam dalam konteks kehidupan modern. Kedua, membekali anak didik dengan berbagai kemampuan pengetahuan dan kebajikan, baik pengetahuan praktis, kesejahteraan, lingkungan sosial, dan pembangunan nasional. Ketiga, mengembangkan kemampuan pada diri anak didik untuk menghargai dan membenarkan superioritas komparatif kebudayaan dan peradaban Islam diatas semua kebudayaan lain. Keempat, memperbaiki dorongan emosi melalui pengalaman imajinatif, sehingga kemampuan kreatif dapat berkembang dan berfungsi mengetahui norma-norma Islam yang benar dan yang salah. Kelima, membantu anak yang sedang tumbuh untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya dengan berpijak pada hipotesis dan konsep-konsep pengetahuan yang dituntut. Keenam, mengembangkan, menghaluskan, dan memperdalam kemampuan komunikasi dalam bahas tulis dan bahasa latin (asing).

Pendidikan Islam Dalam System Pendidikan Nasional

Muhammad S.A. Ibrahim memandang bahwa hakikat pendidikan Islam adalah suatu system pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam sehingga ia dengan mudah membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Hakikat Pendidikan Islam meliputi lima prinsip pokok, yaitu: Pertama, proses transformasi dan internalisasi yakni pelaksanaan pendidikan Islam harus dilakukan secara bertahap, berjenjang dan kontinu dengan upaya pemindahan, penanaman, pengarahan, pengajaran, dan pembimbingan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terstruktur dengan menggunakan pola dan sistem tertentu. Kedua, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yakni upaya yang diarahkan kepada pemberian dan penghayatan serta pengalaman ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Ketiga, pada diri anak didik yakni pendidikan itu diberikan kepada anak didik yang mempunyai potensi rohani. Keempat, melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya yakni tugas pendidikan Islam menumbuhkan, mengembangkan, memelihara dan menjaga potensi laten manusia agar ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, dan bakat-nya. Kelima, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya, yakni tujuan akhir dari proses pendidikan Islam adalah terbentuknya Insan Kamil.

Terkait dengan tujuan pendidikan Islam. Menurut Abdurahman Saleh Abdullah tujuan pendidikan Islam diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu: Pertama, tujuan pendidikan jasmani. Kedua, tujuan pendidikan rohani. Ketiga, tujuan pendidikan akal. Keempat, tujuan pendidikan sosial. Sedangkan, tujuan pendidikan menurut Ali Asraf¹¹ membuat klasifikasi sbb: (1) mengembangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam dan mengembangkan pemahaman rasional mengenai Islam dalam konteks kehidupan modern; (2) membekali anak didik dengan berbagai kemampuan pengetahuan dan kebajikan, baik pengetahuan praktis, kesejahteraan, lingkungan sosial, dan pembangunan nasional; (3) mengembangkan kemampuan pada diri anak didik untuk menghargai dan membenarkan superioritas komparatif kebudayaan dan peradaban Islam di atas semua kebudayaan lain; (4) memperbaiki dorongan emosi melalui pengalaman imajinatif, sehingga kemampuan kreatif dapat berkembang dan berfungsi mengetahui norma-norma Islam yang benar dan yang salah; (5) membantu anak yang sedang tumbuh untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya dengan berpijak pada hipotesis dan konsep-konsep pengetahuan yang dituntut; dan (5) mengembangkan, menghaluskan, dan memperdalam kemampuan komunikasi dalam bahas tulis dan bahasa latin (asing).

Secara yuridis, posisi pendidikan agama (Islam) berada pada posisi yang sangat strategis, baik pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 maupun dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989 dinyatakan, bahwa pendidikan nasional bertujuan " mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sementara dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan pada pasal 2 dan pasal 3, bahwa : "Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Mencermati hal tersebut diatas, terlihat bagaimana pendidikan agama (Islam) beradap ada posisi strategis, disbanding materi pendidikan lainnya. Orientasi pelaksanaannya, bukan hanya pada pengembangan IQ tetapi EQ dan SQ secara harmonis.

Pendidikan Islam dalam dapat dikemukakan pengertiannya dalam tiga hal. Pertama, sebagai lembaga, kedua, sebagai mata pelajaran, dan ketiga, sebagai value (nilai-nilai).Pendidikan Islam sebagai lembaga, sejak Indonesia merdeka ada beberapa lembaga pendidikan Islam formal, yaitu pesantren, sekolah dan madrasah dan perguruan tinggi Islam. Di Pesantren dengan berbagai polanya dilaksanakan pentransferan ilmu-ilmu dan nilai-nilai (value) keislaman. Disekolah sejak Indonesia merdeka dimasukkan mata pelajaran agama, sedangkan dimadrasah sejak Indonesia merdeka telah diprogramkan mata peiajaran agama dan umum yang seimbang.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditindaklanjuti dengan berbagai Peraturan pemerintah (PP) yang berkenaan dengan pendidikan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang prasekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang pendidikan Tinggi (peraturan ini sekarang telah berubah menjadi PP 60 Tahun 1999).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Biasa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.

Pengertian Dikotomi Pendidikan

Secara etimologi, istilah dikotomi berasal bahasa Inggris dichotomy yang berarti pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang dua bagian. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikotomi dapat diartikan sebagai pembagian di dua kelompok yang saling bertentangan. Secara umum, istilah dikotomi digunakan untuk membedakan antara dua hal yang berbeda. Adapun secara istilah, dikotomi dapat dipahami sebagai suatu pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Dikotomi adalah pemisahan secara teliti dan jelas dari suatu jenis menjadi dua yang terpisah satu sama lain dimana yang satu sama sekali tidak dapat dimasukkan ke dalam yang satunya lagi dan sebaliknya.

Dikotomi merupakan suatu istilah yang dipakai untuk memisahkan antara karakter ilmu agama dan umum. Hal ini tidak lepas dari latar belakang historis-kultural, dimana dalam proses perkembangannya ada pemisahan yang dramatis antara kedua bidang ilmu tersebut. Dalam kesejarahan, dikotomi diawali dengan perkembangan pertemuan Islam-Arab dengan budaya lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam serta diakhiri dengan pertentangan cara berpikir yang cukup berpengaruh dalam pembentukan dikotomi ilmu dalam sejarah peradaban Islam. Islam yang ada pada awalnya universal dengan mengakomodir semua permasalahan dan aspek kehidupan, menemukan titik pembelahan ketika ada pertemuan dengan ilmu-ilmu filsafat yang nota bene berasal dari non - Islam. Dalam system pendidikan Islam, dikotomi dapat dipahami sebagai dualisme sistem pendidikan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan yang dikotomik pada pendidikan Islam akan menyebabkan pecahnya peradaban Islam dan akan menafikan peradaban Islam yang kaffah dan universal.

Terjadinya pemisahan ilmu agama dan ilmu umum yaitu sekitar abad pertengahan, dimana umat tidak mempedulikan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga umat Islam mulai terpuruk. Waktu itu, yang berpengaruh hanyalah ulama-ulama fiqih sehingga umat Islam mengalami ketebelakangan dalam hal IPTEK. Contoh yang terjadi pada abad ke 11 M, disalah satu madrasah yaitu Madrasah Nizamiyah yang mengalami perubahan kurikulum yang hanya

menekankan ilmu-ilmu agama khususnya ilmu-ilmu fiqih saja. Sehingga ilmu yang dipelajari hanya berkisar pemahaman tentang hukum islam saja yang menjadi praprioritas dalam pembelajaran.

Stagnasi yang melanda keserjanaan muslim terjadi sejak abad XVI hingga abad XVII M. Kondisi tersebut secara umum merupakan imbas dari kelesuan bidang politik dan budaya masyarakat Islam saat itu cenderung melihat ke atas, melihat gemerlapnya kejayaan abad pertengahan, sehingga lupa kenyataan yang tengah terjadi di lapangan. Maka ilmuan-ilmuan Barat berkata bahwa keunggulan dan kebanggaan tradisi masa lalu telah membuat ilmuan-ilmuan Muslim tidak menanggapi sehingga terlempar atau terdegradasi oleh ilmuan Barat. Padahal jika tantangan tersebut dapat diolah secara baik, maka dunia Muslim dapat mengislamisasikan ilmu pengetahuan tersebut kearah yang Islami.

Munculnya Dikotomi Pendidikan Di Indonesia

Adanya jarak kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan adalah dulaisme system pendidikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Pemisahan atau jarak yang ada berlaku pada system operasionalnya, mata pelajarannya, dsb. Pecahnya peradaban Islam dan akan menafikan peradaban Islam yang kaffah (menyeluruh) merupakan dampak dari dikotomi pendidikan ini. Sejak lama, kondisi berjarak di Indonesia ini sudah terjadi. Tepatnya ketika Belanda menjajah Indonesia memunculkan salah satu pertentangan pada bidang pendidikan yang kemudian merabah menjadi warisan pahit yang sudah mentradisi tetapi tetap saja dipertahankan hingga saat ini, bahkan telah memiliki legalitas yang kuat. Sebagai buktinya, pada sistem pendidikan nasional terdapat dua lembaga penyelenggara yang diakui secara legal, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Secara teknis operasionalnya, Kementerian Pendidikan Nasional itu membawahi lembaga pendidikan, mulai TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi Umum. Sementara Kementerian Agama mengurus lembaga pendidikan RA, MI, MTs, MA, hingga Perguruan Tinggi Agama Islam.

Banyak yang menjadi faktor penyebab timbulnya dikotomi pendidikan di Indonesia. Mulai dari factor internal tiap individu sampai factor eksternal yang sulit untuk diatasi. Seperti contohnya yang menjadi salah satu faktor penyebab eksternal adalah kemajuan teknologi dan peradaban barat yang semakin menjebak umat islam. Pengetahuan umum sejatinya sudah tertulis dalam Al-Qur'an. Faktor kemunduran pada umat Islam saat ini bias menjadi salah satu dampak dari adanya dikotomi pendidikan di Indonesia. Halter sebut dapat dilihat, misalnya dalam dunia pendidikan, banyak ulama yang mengabaikan dan tidak begitu memahami ilmu umum sampai-sampai tidak mampu menjawab persoalan-persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang sedang terjadi, sehingga menghambat penyebarluasan nilai-nilai keislaman di wilayah yang lebih luas. Dan sebaliknya, banyak sarjana generalis yang tidak memahami agama dan tentunya itu merusak nilai kemurnian ilmu itu sendiri. Disinilah muncul ketimpangan, ketika ulama hanya bias menguasai bidang syariah dan ulama umum hanya ahli dibidang umum.

Beberapa faktor tersebut hanya sebagian yang menjadi penyebab adanya dikotomi pendidikan di Indonesia. Ada beberapa factor lain yang menjadi sebab munculnya dikotomi, diantaranya:

Pertama, kebekuan atau kemandekan pola pikir umat Islam. Fenomena keunggulan modernitas dan industrialisasi global yang telah menghegemoni seluruh kehidupan anak manusia sehingga memicu dinamika pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkat-perangkatnya. Hal ini ditandai dengan menurunnya tingkat kreativitas dan orisinalitas intelektual umat Islam. Ini bukan hal yang mudah untuk dinetralisasikan, kemandekan ini harus dibayar dengan ongkos yang mahal oleh umat Islam sebagai akibat dari ketidakberanian mereka mengambil risiko salah dalam melakukan penelitian. (Dainori, 2017).

Kedua, pendudukan imperialisme atas dunia Islam. Ketika Belanda datang ke Indonesia dengan niat awal berdagang tetapi setelah berjalannya waktu muncul misi-misilain yang membuat mereka berkuasa yang salah satu akibatnya mereka menekan umat Islam, terutama hal ini sangat berpengaruh kepada para ulama dan pesantren yang dibinanya. Kebijakan colonial Belanda pada dasarnya mendiskriminasi umat Islam di Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika kebijakan tersebut juga mempengaruhi kebijakan yang mereka ambil terhadap pendidikan Islam itu sendiri, karena mereka menyadari bahwa pelaksanaan pendidikan dimasyarakat terjajah akan mengarah pada gerakan anti-kolonial. Gerakan anti kolonialisme yang dipandu oleh para kiyai dan ulama ini menjadi latar belakang sikap waspada dan antisipasi Belanda kepada umat Islam. Hal ini pula yang menimbulkan rasa khawatir dan takut melihat peperangan menentang penjajahan yang selalu melibatkan umat Islam di dalamnya. Sehingga kebijakan-kebijakan mereka mengenai ulama nantinya juga berpengaruh kepada pendidikan Islam. Mereka khawatir akan timbulnya mitansi kaum muslimin terpelajar sehingga mereka lebih menekankan kelas masyarakat terdidik yang berbudaya barat melalui pendidikan ala Belanda, sehingga akan lebih akomodatif terhadap kepentingan penjajah (Sumanti, 2018).

Ketiga, perkembangan zaman yang berpengaruh pada dunia muslim. Salah satu yang menjadi penyebab dari dikotomi pendidikan di Indonesia adalah berkembangnya zaman atau lebih dikenal dengan modernisasi yang berdampak pada segala bidang, salah satunya pendidikan. Dalam bukunya Prof. Azyumardi Azra (2012) menyatakan bahwa pendidikan dalam masyarakat modern atau masyarakat yang tengah bergerak ke arah modern (Modernizing) pada dasarnya berfungsi memberikan kaitan antara peserta didik dan lingkungan sosio-kulturalnya yang terus berubah. Dalam banyak hal, pendidikan secara sadar digunakan sebagai instrument untuk perubahan dalam sistem politik dan ekonomi. Untuk mencapai semua tujuan ini, modernisasi pada pendidikan mengalami perubahan fungsional dan antarsistem. Dikarenakan budaya barat yang sangat mendominasi sehingga ini pula yang menjadikan terserapnya budaya barat secara total bersamaan dengan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Sebagai akibatnya, lahirlah pendidikan umat Islam yang sekularistik, rasionalistik dan materialistik (Azra, 2012).

Keempat, faktor kelembagaan pendidikan Islam yang kurang mampu melakukan upaya pembenahan dan perbaikan akibat kompleksnya problematika ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dialami oleh umat dan negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Jika dilihat, memang hal ini memiliki tingkat keberpengaruhan yang signifikan terhadap pendidikan.

Kelima, munculnya ruang antara pemikiran dan aksi di kalangan umat Islam. Di awal sejarah Islam, umat muslim dengan sadar berusaha menyelidiki realitas tentang

materi-materi dan kesempatan-kesempatan untuk kemudian dibentuk kembali ke dalam pola-pola Islam. Wawasan Islam pada waktu itu sangat dominan, dan hasrat untuk mewujudkan wawasan Islam di dalam sejarah menentukan semua tingkah laku. Pada kala itu, jika ada yang merasa lemah atau tidak terlalu yakin, maka orang-orang disekitarnya membantu dalam mengatasi kekurangan demi cita-cita islam.

Dampak Dikotomi Pada Sistem Pendidikan Di Indonesia

Untuk persoalan dikotomi pendidikan di Indonesia sekiranya sudah mendarah-daging sejak lama. Hal ini dikarenakan hal ini sudah ada sejak Belanda menjajah negeri ini. Pendidikan yang telah dirasuki oleh dikotomi ini menampilkan wujud yang kurang enak untuk dipandang. Jelas saja, hal ini akan berdampak pada pengelolaan pendidikan nasional yang tidak memiliki dasar yang jelas. Jika dasarnya tidak jelas, maka proses dan hasil tidak akan jelas.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa dikotomi pendidikan di Indonesia ini akan sangat berdampak pada pendidikan itu sendiri. Setidaknya ada beberapa dampak yang menimpa pendidikan Indonesia jika dikotomi pendidikan ini terus terjadi. Pertama, munculnya ambivalensi dalam system pendidikan Islam. Arti kata ambivalensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perasaan tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang pada waktu yang sama. Pendidikan islam padadasarnya memiliki tujuan yang berorientasi sepenuhnya pada tujuan pendidikan islam. Tetapi system pendidikan sekarang membagi porsi materi pendidikan islam dan materi pendidikan umum dalam presentase tertentu. Sehingga telah terjadi pergeseran makna bahwa mata pelajaran agama hanya menjadi stempel pendidikan modern dan sekuler. Kedua, munculnya kesenjangan antara sistem pendidikan islam dan ajaran islam. Sistem pendidikan yang ambivalen mencerminkan pandangan dikotomis yang memisahkan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Pandangan tersebut jelas bertentangan dengan konsep ajaran Islam sendiri yang bersifat integral, dimana Islam mengajarkan harus adanya keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Dikotomi terlihat dengan jelas pada dualisme sistem pendidikan di negeri-negeri muslim, sistem pesantren dengan segala variasi dan implikasinya dalam pembentukan wawasan intelektual keislaman umat, dan system pendidikan sekuler dengan segala dampak dan akibatnya dalam persepsi keagamaan. Ketiga, terjadinya disintegrasi atau keadaan tidak bersatu padu dalam system pendidikan islam. Munculnya ketidakpastian pendidikan umum dan pendidikan agama memperburuk keadaan. Warisan buruk yang terus mengakar yang bermula dari penjajahan Belanda ke Indonesia mengakibatkan kesenjangan antara wawasan guru agama dan kebutuhan anak didik, terutama disekolah umum. Hal lain yang menjadi penyebab dari disintegrasi pendidikan islam adalah melihat persaingan antara sistem pendidikan umum atau barat dan agama atau islam yang berusaha mempertahankan eksistensinya. Dikotomi dan dualism system pendidikan islam yang ada di Indonesia, dan lainnya, seperti di atas salah satunya bermula dari pandangan dikotomik tentang kehidupan (yakni dunia dan akherat), struktur manusia (jasmani dan rohani), serta ilmu (agama dan "umum". Dari dikotomi-dikotomi tersebut, maka dualisme sistem pendidikan di Indonesia pun tumbuh berkembang. Pendidikan Islam diposisikan pada aspek akhirat, rohani, dan agama saja, sementara pendidikan umum

diposisikan pada aspek duniawi, jasmani, dan sains (ipteks). Dengan demikian, pendidikan keagamaan dihadapkan dengan pendidikan non-keagamaan, pendidikan keislaman dengan non-keislaman, pendidikan agama dengan pendidikan umum, demikian seterusnya. Keempat, munculnya inferioritas atau perasaan yang timbul akibat lemahnya kondisipsikologis dan sosial yang dirasakan secara pribadi atau perasaan yang timbul karena kelemahan yang dimiliki atau cacat tubuh yang ada pada pengelola lembaga pendidikan Islam.

Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan Barat yang pada kenyataannya kurang menghargai nilai-nilai cultural dan moral telah dijadikan tolak ukur kemajuan dan keberhasilan system pendidikan Indonesia. Beberapa dampak dari pendikotomian pendidikan diatas termasuk pada dampak yang bisa tergolong kecil. Masih banyak dampak buruk yang bisa kita jumpai, seperti rapuhnya metodologi Islam, sulitnya para lulusan perguruan tinggi Islam dalam mencari pekerjaan, dan lain sebagainya.

Upaya Menghindari Dikotomi Ilmu

Kurikulum pendidikan Islam terus menghadapi tantangan. Dalam institusi pendidikan pun harus dilakukan pembenahan. Baik dari sisi pendidik ataupun manajemen pendidikannya. Setiap pendidik agama Islam haruslah benar-benar menguasai ajaran agamanya dan metode-metode dalam mengajarkannya. Dan diharapkan pendidik juga mau mengembangkan kompetensi dirinya agar lebih baik lagi. Ada kesulitan dalam mengintegrasikan dua kutub paradigma ilmiah dualistik. Apabila kesemua ini bisa menerapkan setiap solusi dari tantangan-tantangan yang ada maka Pendidikan Agama Islam akan lebih berkembang dan terciptalah masyarakat yang baik sesuai dengan budaya yang sang pencipta inginkan. Di satu sisi dia harus berurusan dengan "mata pelajaran sekuler", disisi lainnya adalah "barang-barang keagamaan". Apa yang dianggap sekuler? Secara umum, Matematika, Fisika, Biologi, Kedokteran, Sosiologi, Ekonomi, Politik, Botani, Zoologi, dll. Sedangkan mata pelajaran agama terdiri dari ilmu-ilmu yang diturunkan dari jenis berikut: Quran, AlHadit, AlFik, Teologi, Tasawuf, Tauhid, dll (Ikhwan, 2014).

Melihat muatan nilai pendidikan yang serba samar dan terlalu beraroma barat akhir-akhir ini beredar wacana untuk mengislamkan ilmu pengetahuan. Dalam arti ini dapat dikatakan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan merupakan solusi alternatif-strategis. Upaya ini merupakan hal menggembirakan untuk menyuburkan iklim tersebut. Tetapi apabila hanya bersifat euforia, tentunya sangat disesalkan. Alih-alih mencari solusi alternative strategis kenyataannya bisa saja menjadi solusi alternative strategis bagi golongan tertentu yang hanya mencari keuntungan dari opini publik yang memang potensinya besar karenakan mayoritas penduduknya Muslim. Para cendekiawan muslim berpendapat bahwa dikotomi harus segera diakhiri dengan mengintegrasikan sistem pendidikan dengan menciptakan sistem ketiga yang sekaligus sebagai antitesa dari sistem pendidikan tradisional dan modern. Sistem pendidikan tradisional bertujuan menanamkan seperangkat nilai yang berasal dari Al-Qur'an agar tercapai kesalehan pada diri anak didik. Pada sisi lain system pendidikan modern berupaya menjelaskan asal usul alam semesta atau fenomena alam tanpa berpijak ada nilai-nilai transcendental (Aini & Lazuardy, 2020).

Pola pikir integratif merupakan pendefinisian dari solusi dikotomi pendidikan di Indonesia yang berarti proses penyatuan arti kehidupan antara dunia dan akhirat. Hakikatnya pendidikan umum adalah pendidikan agama pula, begitupun sebaliknya pendidikan umum adalah pendidikan agama pula. Dalam langkah-langkah operasional pendidikan dapat berpedoman pada nilai-nilai Al-Qur'an sesuai dengan tiga serangkai perangkat tidak yakni motivasi-cara dan tujuan. Keberagaman yang terjadi pada bidang pendidikan mendorong pemerintah untuk membuat sebuah penyeragaman pendidikan yang disebut dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Tujuan dari dibuatnya Standar Nasional Pendidikan ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka demi mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan dasar Negara kita yaitu Pancasila dan UUD 1945.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendidikan Islam adalah sebuah konsep yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu Muslim dan memberikan panduan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya tentang pengajaran agama, tetapi juga tentang membentuk karakter dan moral individu Muslim. Pendidikan juga merupakan sebuah proses untuk memanusiakan manusia, sehingga integritas dalam pendidikan ini sangat penting. Dikotomi yang dirasakan dalam penyelenggaraan pendidikan salah satunya yaitu perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Sistem pendidikan yang dikotomik pada pendidikan Islam inilah yang akan menyebabkan pecahnya peradaban Islam dan akan menafikan peradaban Islam yang kaffah (menyeluruh). Sebelum terlalu dalam terjadinya dikotomi pendidikan agama Islam didalam pendidikan nasional maka dikotomi harus segera diakhiri salah satunya dengan menerapkan diintegrasikan pendidikan Islam.

Saran

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini sudah seharusnya kita memanfaatkan dikotomi pendidikan, kita harus mempelajari antara ilmu umum dan ilmu agama serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga di dunia ini mendapatkan keduanya yang memang sangat dibutuhkan pada saat ini. Mempelajari dualisme pendidikan tanpa harus mendiskriminasi antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aini, K. D. N., & Lazuardy, A. Q. (2020). Kritik Dualisme dalam Pendidikan Islam. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2, 307–312.
- Al-Faruqi, I. (1982). *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. International Institute of Islamic Thought.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (I. Thaha, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Kencana.

- Bashori. (2017). Paradigma Baru Pendidikan Islam (Konsep Pendidikan Hadhari). *Jurnal Penelitian IAIN Pekalongan*, 11(1), 141. <https://doi.org/10.21043/jupe.v11i1.2031>
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press.
- Dainuri. (2018). Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 1–8.
- Ikhwan, A. (2014). Integrasi Pendidikan Islam (Nilai-Nilai Islami dalam Pembelajaran). *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 179–194. <https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.2.179-194>
- Iskandar, Jamaluddin, Iqbal, M., & Muzzakir. (2022). Dikotomi Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Al-Muslim*, 1(1), 11–18.
- Lubis, L., & Asry, W. (2020). *Ilmu Pendidikan Islam* (1st ed.). Perdana Publishing.
- Moelong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29–39.
- Sumanti, S. T. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1(1), 44–62. <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i1.1791>